



Keterbatasan Pemberdayaan Dalam Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL): Studi Pada KWT Aur Kuning Kelurahan Bungus Barat

Rahmatul Aini¹, Rahmadani Yusran^{2*}

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 28-03-2026

Diterima: 04-04-2026

Diterbitkan: 27-04-2026

Abstrak: Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga berbasis pemanfaatan pekarangan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, capaian pemberdayaan seringkali belum optimal dan cenderung berhenti pada pemenuhan kebutuhan subsistensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pemberdayaan dalam implementasi kebijakan KRPL pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning di Kelurahan Bungus Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan secara terstruktur dan mampu meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan. Namun demikian, proses pemberdayaan belum berkembang secara optimal yang ditandai oleh rendahnya partisipasi anggota, ketergantungan terhadap pendampingan penyuluh, serta terbatasnya orientasi ekonomi kelompok. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan pekarangan cenderung bersifat subsisten dan belum mampu mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga secara signifikan. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan KRPL sebagai instrumen pemberdayaan dengan realitas implementasinya di tingkat lokal.

Kata Kunci: KRPL, Pemberdayaan, Subsistensi, Ketahanan Pangan, Implementasi Kebijakan

Abstract: The Sustainable Food Home Area (KRPL) program is a government policy aimed at strengthening household food security through yard utilization while encouraging community empowerment. However, in its implementation, empowerment outcomes are often suboptimal and tend to stop at meeting subsistence needs. This study aims to analyze the limitations of empowerment in the implementation of the KRPL policy in the Aur Kuning Women's Farmers Group (KWT) in West Bungus Village. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that the program has been implemented in a structured manner and has been able to increase household food availability through yard utilization. However, the empowerment process has not developed optimally, as indicated by low member participation, dependence on extension assistance, and limited group economic orientation. This condition causes yard utilization to tend to be subsistence and has not been able to significantly increase household income. This study confirms the gap between the normative objectives of the KRPL policy as an empowerment instrument and the reality of its implementation at the local level.

Keywords: *KRPL, empowerment, subsistence, food security, policy implementation*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga akses, kualitas konsumsi, serta keberlanjutan sistem pangan masyarakat. Pengalaman krisis pangan global tahun 2008 menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional sangat rentan terhadap dinamika eksternal apabila tidak ditopang oleh sistem yang kuat di tingkat lokal (Food and Agriculture Organization, 2011). Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan produksi, tetapi juga sebagai bagian dari kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan (Sen, 1981). Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan pangan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menempatkan ketahanan pangan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mengembangkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), agar mampu mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2017). Dalam perspektif pemberdayaan, program semacam ini idealnya tidak hanya menghasilkan

output berupa ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi (Chambers, 1995).

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, tujuan pemberdayaan tersebut tidak selalu tercapai secara optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program berbasis masyarakat seringkali menghadapi keterbatasan dalam aspek partisipasi, kapasitas kelembagaan, serta keberlanjutan kegiatan (Mazmanian & Sabatier, 1983; Grindle, 1980). Selain itu, penelitian dalam konteks pembangunan pertanian dan ketahanan pangan menunjukkan bahwa banyak program berbasis komunitas cenderung berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar (subsistensi) dan belum berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan (Swinnen et al., 2018). Dalam konteks KRPL, kondisi tersebut tercermin dari masih terbatasnya diversifikasi pangan, rendahnya skala produksi, serta minimnya keterhubungan dengan pasar (Kusnadi, 2019; Astrini, 2021). Akibatnya, pemanfaatan pekarangan cenderung bersifat subsisten dan belum mampu mendorong pemberdayaan ekonomi rumah tangga secara signifikan.

Kondisi serupa juga ditemukan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning di Kelurahan Bungus Barat. Meskipun program KRPL telah dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, pemanfaatan pekarangan oleh anggota kelompok belum sepenuhnya optimal. Partisipasi anggota yang tidak merata, ketergantungan terhadap pendampingan penyuluh, serta keterbatasan pengetahuan teknis menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan program. Selain itu, hasil produksi yang lebih banyak digunakan untuk konsumsi sendiri menunjukkan bahwa orientasi pemberdayaan ekonomi belum berkembang secara signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif program KRPL sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dengan realitas implementasinya di tingkat lokal, di mana proses pemberdayaan cenderung berhenti pada level subsistensi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pemberdayaan dalam implementasi kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kelompok Wanita Tani Aur Kuning di Kelurahan Bungus Barat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti fenomena pemberdayaan yang tidak berkembang secara linear, melainkan mengalami stagnasi pada level subsistensi sebagai bentuk keterbatasan implementasi kebijakan berbasis masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika implementasi kebijakan serta memperkaya perspektif mengenai pemberdayaan dalam konteks kebijakan publik di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta mengidentifikasi keterbatasan pemberdayaan dalam pelaksanaannya di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika implementasi kebijakan serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam program.

Lokasi penelitian ditetapkan secara *purposive* di Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini merupakan salah satu penerima program KRPL yang masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga relevan untuk mengkaji kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program. Informan dalam penelitian ini meliputi ketua dan anggota KWT, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta pihak terkait dari dinas dan pemerintah kelurahan.

Variasi informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mencerminkan berbagai perspektif dalam implementasi program.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta regulasi terkait program KRPL. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 2007) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait aspek pemberdayaan, partisipasi, dan hasil implementasi program. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan guna menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program KRPL dan Keterbatasan Pemberdayaan

Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan melalui tahapan yang relatif sistematis, mulai dari sosialisasi, pembentukan kelompok, pemberian bantuan, hingga monitoring dan evaluasi. Secara empiris, pelaksanaan program mampu mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan budidaya tanaman pangan seperti cabai, bayam, kangkung, dan tanaman kebutuhan dapur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berkontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan rumah tangga.

Temuan mengenai keterbatasan pemberdayaan dalam implementasi KRPL di KWT Aur Kuning sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas individu dan kondisi sumber daya lokal. Penelitian Khuswati et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok berpengaruh terhadap kemampuan adopsi inovasi budidaya, sementara Tobing et al. (2019) menegaskan bahwa ketersediaan air dan penguasaan teknologi menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan kegiatan pekarangan. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan pengetahuan teknis dan ketergantungan terhadap penyuluh mengindikasikan bahwa kapasitas internal kelompok belum cukup kuat untuk menopang keberlanjutan program secara mandiri. Hal ini memperkuat temuan bahwa hambatan pemberdayaan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teknis dan struktural.

Namun, jika dianalisis dalam perspektif pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh Sen (1981), pemberdayaan tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dari peningkatan kapasitas dan kebebasan dalam menentukan pilihan ekonomi. Dalam konteks ini, implementasi KRPL di KWT Aur Kuning masih menunjukkan keterbatasan, karena aktivitas yang dilakukan lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan (subsistensi) dibandingkan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Meskipun program telah berjalan secara administratif dan teknis, capaian pemberdayaan yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pada level prosedural belum tentu sejalan dengan keberhasilan substantif dalam mendorong kemandirian masyarakat. Dengan kata lain, program mampu menghasilkan output berupa peningkatan ketersediaan pangan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan outcome berupa peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian kelompok.

Lebih lanjut, kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa implementasi program masih berfokus pada pemenuhan target kegiatan dan distribusi bantuan, dibandingkan pada penguatan kapasitas jangka panjang. Hal ini tercermin dari pola pelaksanaan yang masih bergantung pada intervensi eksternal, seperti pendampingan penyuluh dan bantuan sarana produksi. Akibatnya, proses pembelajaran dan penguatan kapasitas internal kelompok belum berkembang secara optimal, sehingga kemampuan anggota dalam mengelola kegiatan secara mandiri masih terbatas.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tahapan pelaksanaan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan mampu mengakomodasi kondisi sosial dan kapasitas lokal masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle (1980) yang menekankan bahwa hasil implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi, termasuk karakteristik kelompok sasaran dan kapasitas aktor pelaksana. Ketidakesesuaian antara desain kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan dengan realitas kapasitas kelompok di tingkat lokal berpotensi menghasilkan capaian yang bersifat parsial. Program berjalan, tetapi tidak sepenuhnya menghasilkan transformasi yang diharapkan.

Selain itu, keterbatasan pemberdayaan juga dapat dilihat dari belum terbentuknya orientasi ekonomi dalam aktivitas kelompok. Pemanfaatan pekarangan masih diposisikan sebagai strategi pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, bukan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum mampu mendorong perubahan orientasi dari sekadar konsumsi menuju produksi yang bernilai ekonomi.

Implementasi KRPL di KWT Aur Kuning memperlihatkan bahwa pemberdayaan yang diharapkan dalam kebijakan belum sepenuhnya terwujud, melainkan masih berada pada tahap awal yang ditandai oleh pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut melalui aspek partisipasi, ketergantungan, serta dinamika kapasitas kelompok yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Partisipasi dan Ketergantungan dalam Implementasi Program

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keterbatasan pemberdayaan adalah tingkat partisipasi anggota kelompok. Meskipun program telah diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pembentukan kelompok secara partisipatif, dalam praktiknya tidak seluruh anggota terlibat secara aktif dalam kegiatan budidaya maupun pengelolaan kelompok. Partisipasi yang tidak merata ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum mampu membangun kapasitas kolektif kelompok secara optimal.

Secara empiris, tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok masih tergolong rendah. Dari total anggota kelompok, hanya sekitar ±40–50% yang aktif terlibat dalam kegiatan rutin seperti penanaman dan pertemuan kelompok. Sebagian anggota lainnya cenderung pasif dan hanya terlibat pada saat pembagian bantuan. Salah satu informan menyatakan bahwa “tidak semua anggota ikut menanam, ada yang hanya datang saat ada pembagian bibit saja”. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi belum bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, melainkan masih bersifat situasional.

Dalam perspektif pemberdayaan partisipatif yang dikemukakan oleh Chambers (1995), partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam kegiatan, tetapi mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Rendahnya partisipasi anggota KWT Aur Kuning mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya berbasis inisiatif masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi yang terjadi masih berada pada level operasional, belum mencapai level kontrol atau kemandirian.

Selain itu, implementasi program juga menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peran penyuluh pertanian. Sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa kegiatan kelompok “tidak dilepas begitu saja, tetapi selalu ada bimbingan dari penyuluh”. Ketergantungan ini mencerminkan bahwa transfer pengetahuan dan kapasitas belum berjalan optimal, sehingga anggota kelompok belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola kegiatan secara mandiri.

Dalam kerangka implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif Grindle (1980) yang menekankan pentingnya kapasitas aktor pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi. Keterbatasan kapasitas kelompok menyebabkan program tidak berkembang secara mandiri, melainkan tetap bergantung pada intervensi eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pada aspek kegiatan tidak diikuti oleh keberhasilan dalam membangun kapasitas aktor lokal sebagai pelaksana utama program.

Dominasi peran penyuluh dalam implementasi program dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan tipologi peran aktor sebagaimana dikemukakan oleh Tyas (2019), yaitu sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Dalam konteks KWT Aur Kuning, penyuluh cenderung lebih berperan sebagai fasilitator yang menyediakan bantuan teknis dan pendampingan kegiatan, namun belum optimal menjalankan fungsi sebagai dinamisator yang mendorong inisiatif dan partisipasi aktif anggota, maupun sebagai katalisator yang mampu mempercepat transformasi menuju kemandirian ekonomi kelompok. Kondisi ini menyebabkan proses pemberdayaan berjalan tidak seimbang, di mana dukungan eksternal kuat, tetapi kapasitas internal kelompok belum berkembang secara signifikan.

Lebih jauh, hubungan antara rendahnya partisipasi dan tingginya ketergantungan ini membentuk suatu pola yang saling memperkuat. Rendahnya keterlibatan anggota menyebabkan terbatasnya proses pembelajaran dan penguatan kapasitas, sementara ketergantungan terhadap penyuluh mengurangi ruang bagi anggota untuk mengembangkan inisiatif dan kemandirian. Kondisi ini pada akhirnya menghambat proses pemberdayaan yang seharusnya mendorong masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan program.

Partisipasi yang terbatas dan ketergantungan terhadap aktor eksternal tidak hanya memengaruhi proses pelaksanaan program, tetapi juga berdampak langsung pada capaian pemberdayaan. Keterbatasan ini tercermin dalam belum berkembangnya diversifikasi pangan dan lemahnya orientasi ekonomi kelompok, sehingga implementasi program cenderung berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar dan belum mampu mendorong transformasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pemberdayaan tidak hanya terletak pada aspek partisipasi dan kapasitas, tetapi juga berkaitan dengan hasil yang dihasilkan program, khususnya dalam aspek diversifikasi pangan dan orientasi ekonomi kelompok yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Keterbatasan Diversifikasi dan Orientasi Ekonomi

Implementasi Program KRPL pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketersediaan pangan serta mendorong konsumsi pangan yang lebih beragam di tingkat rumah tangga. Melalui pemanfaatan pekarangan, anggota kelompok menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, cabai, dan tanaman bumbu dapur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berhasil memperluas akses rumah tangga terhadap sumber pangan alternatif.

Selain faktor partisipasi dan kapasitas yang telah dijelaskan sebelumnya, dimensi struktural seperti keterbatasan lahan juga menjadi aspek penting dalam implementasi program KRPL, terutama dalam konteks wilayah perkotaan dan semi-perkotaan seperti Kota Padang. Sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawan et al. (2018), keterbatasan ruang menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pertanian pekarangan. Dalam kasus KWT Aur

Kuning, sebagian anggota memiliki lahan pekarangan yang sempit sehingga membatasi skala produksi. Beberapa anggota menyiasati kondisi ini melalui penggunaan media tanam sederhana seperti polybag dan rak bertingkat (vertikultur), namun penerapannya masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal dalam kegiatan kelompok.

Namun demikian, jika ditinjau lebih lanjut, diversifikasi pangan yang dihasilkan masih bersifat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Jenis tanaman yang dibudidayakan cenderung homogen dan didominasi oleh komoditas dengan siklus tanam pendek serta nilai ekonomi yang relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa diversifikasi yang terjadi masih berada pada level konsumsi dasar, belum berkembang menjadi strategi produksi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi rumah tangga.

Dalam perspektif kapabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Sen (1981), peningkatan akses terhadap sumber daya belum tentu diikuti oleh peningkatan kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif. Dalam konteks ini, meskipun anggota kelompok memiliki akses terhadap lahan pekarangan dan sarana produksi, keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta akses pasar menyebabkan potensi ekonomi dari kegiatan tersebut belum dapat dimaksimalkan.

Dari sisi ekonomi, implementasi program lebih banyak memberikan manfaat dalam bentuk penghematan pengeluaran rumah tangga dibandingkan peningkatan pendapatan. Hasil panen sebagian besar digunakan untuk konsumsi sendiri, sementara aktivitas penjualan hanya dilakukan secara terbatas ketika terjadi kelebihan produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi dalam kegiatan kelompok belum berkembang secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh Chambers (1995), pemberdayaan seharusnya mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Namun, dalam implementasi KRPL di KWT Aur Kuning, kegiatan yang dilakukan masih belum mampu mendorong pergeseran dari aktivitas subsisten menuju aktivitas ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum mencapai tahap transformasi ekonomi, melainkan masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar.

Lebih lanjut, keterbatasan dalam diversifikasi dan orientasi ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi partisipasi dan kapasitas kelompok yang telah dibahas sebelumnya. Rendahnya partisipasi anggota dan tingginya ketergantungan terhadap penyuluh menyebabkan terbatasnya inisiatif kelompok dalam mengembangkan jenis komoditas, memperluas skala produksi, serta menjangkau pasar. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat repetitif dan tidak berkembang ke arah yang lebih produktif.

Dengan demikian, keterbatasan diversifikasi dan orientasi ekonomi dalam implementasi KRPL menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Aktivitas pemanfaatan pekarangan masih didominasi oleh tujuan konsumsi rumah tangga, sehingga pemberdayaan ekonomi yang diharapkan belum terwujud secara optimal.

Kondisi ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa keterbatasan dalam aspek ekonomi bukan hanya persoalan teknis produksi, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan yang lebih luas antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasinya di tingkat lokal, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Kesenjangan antara Tujuan Kebijakan dan Realitas Implementasi

Secara normatif, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dirancang sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Program ini mengandung asumsi bahwa pemanfaatan

pekarangan tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi berbasis rumah tangga.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program di Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning lebih banyak menghasilkan capaian pada aspek ketersediaan pangan dan penghematan pengeluaran rumah tangga, sementara dimensi pemberdayaan ekonomi belum berkembang secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang bersifat transformasional dengan realitas implementasi yang masih bersifat subsisten.

Dalam perspektif pemberdayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Sen (1981) pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dengan kemampuan individu atau kelompok dalam memperluas pilihan hidup dan mengakses peluang ekonomi secara mandiri. Dalam konteks ini, implementasi KRPL di KWT Aur Kuning belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapabilitas anggota kelompok untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas pemanfaatan pekarangan masih terbatas pada produksi untuk konsumsi sendiri, sehingga belum mencerminkan perluasan kapasitas ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif pemberdayaan partisipatif menurut Chambers (1995), pemberdayaan seharusnya mendorong pergeseran posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan. Namun, dalam praktik implementasi KRPL, masyarakat masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peran penyuluh dan bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian, melainkan masih berada dalam kerangka intervensi yang bersifat top-down.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dijelaskan melalui kerangka Grindle (1980) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas aktor pelaksana serta konteks sosial-ekonomi di tingkat lokal. Dalam kasus KRPL di KWT Aur Kuning, keterbatasan kapasitas anggota kelompok, rendahnya partisipasi, serta minimnya akses terhadap pasar menjadi faktor yang membatasi tercapainya tujuan pemberdayaan.

Secara praktis, keterbatasan pemberdayaan ini tercermin dalam beberapa kondisi utama, yaitu: (1) pemanfaatan pekarangan yang masih berorientasi pada konsumsi rumah tangga (subsistensi), (2) belum berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis hasil produksi pekarangan, (3) ketergantungan yang tinggi terhadap pendampingan penyuluh, serta (4) terbatasnya diversifikasi dan skala produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga.

Keterbatasan pemberdayaan dalam implementasi program KRPL tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara desain kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan dengan kapasitas nyata masyarakat sebagai pelaksana di tingkat lokal. Program yang secara normatif dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi pada akhirnya lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga pemberdayaan yang diharapkan cenderung berhenti pada level subsistensi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis masyarakat seperti Program KRPL tidak dapat semata-mata diukur dari keberhasilan administratif atau teknis pelaksanaan program, melainkan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan proses pemberdayaan yang substantif. Dalam konteks ini, keterbatasan pemberdayaan yang terjadi pada KWT Aur Kuning memperlihatkan bahwa keberhasilan program dalam meningkatkan ketersediaan pangan belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan bukanlah hasil yang instan, tetapi merupakan proses yang membutuhkan penguatan kapasitas, partisipasi aktif, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan implementasi kebijakan yang masih dominan bersifat top-down berpotensi membatasi ruang tumbuhnya inisiatif lokal. Ketergantungan terhadap penyuluh dan bantuan pemerintah mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya bertransformasi menjadi aktor yang mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, desain kebijakan yang lebih menekankan pada penyediaan input seperti bantuan sarana dan pendampingan teknis cenderung belum diimbangi dengan strategi penguatan kapasitas ekonomi dan kelembagaan kelompok secara berkelanjutan. Akibatnya, program lebih berfungsi sebagai instrumen fasilitasi produksi pangan rumah tangga dibandingkan sebagai mekanisme transformasi sosial-ekonomi masyarakat. Keterbatasan pemberdayaan dalam program KRPL ini tidak hanya mencerminkan persoalan pada level kelompok, tetapi juga menggambarkan kelemahan dalam orientasi implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kelompok Wanita Tani Aur Kuning telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan ketersediaan pangan serta mengurangi pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mampu merealisasikan tujuan pemberdayaan yang diharapkan dalam kebijakan. Berbagai keterbatasan, seperti rendahnya partisipasi anggota, ketergantungan terhadap pendampingan, terbatasnya diversifikasi produksi, serta belum berkembangnya orientasi ekonomi kelompok, menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih berada pada tahap awal dan cenderung berhenti pada pemenuhan kebutuhan subsisten.

Implementasi KRPL di tingkat lokal memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang bersifat transformasional dengan realitas pelaksanaan yang masih bersifat adaptif dan terbatas. Temuan ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai dinamika pelaksanaan program, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan berbasis pemberdayaan sangat bergantung pada kemampuan implementasi dalam mengintegrasikan aspek teknis, kapasitas sosial, dan orientasi ekonomi secara simultan. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, program pemberdayaan berisiko terjebak pada capaian jangka pendek yang bersifat subsisten dan belum mampu mendorong transformasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan pemberdayaan dalam program berbasis masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan implementasi, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan realitas kapasitas sosial-ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Aur Kuning menunjukkan bahwa program telah berjalan secara administratif dan teknis sesuai dengan tahapan yang direncanakan, serta mampu meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan. Program ini juga memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk penghematan pengeluaran rumah tangga serta memperkuat interaksi sosial antaranggota kelompok.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tujuan pemberdayaan yang menjadi orientasi utama kebijakan belum tercapai secara optimal. Proses pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan orientasi ekonomi kelompok justru masih terbatas dan cenderung berhenti pada pemenuhan kebutuhan subsisten. Keterbatasan ini ditandai oleh rendahnya partisipasi anggota, ketergantungan terhadap pendampingan penyuluh, terbatasnya diversifikasi dan skala produksi, serta belum berkembangnya akses dan orientasi pasar.

Keterbatasan pemberdayaan dalam implementasi kebijakan KRPL tidak hanya mencerminkan persoalan teknis pelaksanaan program, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat transformasional dengan kapasitas masyarakat di tingkat lokal. Program yang dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi pada akhirnya lebih berfungsi sebagai mekanisme penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan pendekatan implementasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan dan kegiatan teknis, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu mendorong peningkatan partisipasi aktif anggota kelompok melalui mekanisme yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal. Kedua, peran penyuluh perlu diarahkan tidak hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan yang mampu mentransfer pengetahuan dan mendorong kemandirian kelompok.

Ketiga, diperlukan penguatan aspek ekonomi program melalui pengembangan akses pasar, diversifikasi produk, serta pelatihan kewirausahaan bagi anggota kelompok wanita tani. Keempat, desain kebijakan KRPL perlu lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga implementasi program tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan subsisten, tetapi mampu mendorong transformasi menuju kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan transformasi pendekatan implementasi program dari yang semula berfokus pada distribusi bantuan input menuju penguatan kapasitas ekonomi kelompok secara berkelanjutan. Secara operasional, transformasi ini dapat dilakukan melalui: (1) pembentukan unit usaha kelompok berbasis hasil pekarangan, (2) pengembangan jejaring pemasaran lokal, seperti kerja sama dengan pasar tradisional maupun pelaku UMKM, (3) pelatihan pengolahan hasil (value added) untuk meningkatkan nilai ekonomi produk, serta (4) penguatan kelembagaan kelompok melalui sistem pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pergeseran aktivitas kelompok dari sekadar subsistensi menuju kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Astrini, D. (2021). Dampak partisipasi anggota kelompok perempuan petani terhadap kesejahteraan keluarga: Studi kasus kelompok perempuan petani Pendopo 6. *Jurnal Ilmiah Manajemen Serikat*, 9(2), 161–170.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Institute of Development Studies.
- Food and Agriculture Organization. (2011). *The state of food insecurity in the world 2011*. FAO.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2017). Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang pedoman teknis optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- Kusnadi, I. H. (2019). Implementasi kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang. *The World of Public Administration Journal*, 1(1), 1–19.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press.

- Swinnen, J., et al. (2018). Agricultural transformation and rural development: New perspectives. *Global Food Security*, 16, 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.10.001>
- Tando, E. (2018). Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pengembangan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL) dalam mendukung penerapan teknologi budidaya sayuran organik di Sulawesi Tenggara. *AgroRadix: Jurnal Ilmu Pertanian*, 2(1), 14–22.